

**ANALISIS KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI  
TERHADAP KEBERHASILAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)  
BERBASIS AKRUAL**

**Riswan Ludfi<sup>1</sup>**

**Hamida Ahyani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>SekolahTinggi IlmuEkonomi Indonesia (STIE Indonesia) Banjarmasin  
Jalan H. Hasan Basry No.9-11 Banjarmasin 70123 Telp. 0511-3304652 Faks.0511-3305238

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin  
Jalan H. Hasan Basry No.26 Banjarmasin 70123

---

**Artikel info**

Keywords:

Human resources, informa-  
tion technology system,  
accounting standart with  
accrual basis

---

**Abstract**

The aims of this research were to analyzing the Quality of Human Resource and the Information Technology System variables as independent toward the application of Government Accounting Standard with Accrual Basis Application. The research sample were taken with interview and survey method throught spreading questionnaires toward on Government of South Kalimantan Province dan focused to financial bureau.

The result of the research showed that Government of South Kalimantan Province has a human resource quality in terms of fulfilling accounting standard with accrual basis and the financial bureau has been supported by adequated information system to bolster the efficiency and efectivity of accounting activity on presenting accounting report

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah menca-  
nangkan reformasi di bidang akuntansi pe-  
merintahan yang diwujudkan dengan mela-  
hirkan tiga paket undang-undang di bidang  
keuangan negara. Undang-undang tersebut  
adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun  
2003 Tentang Keuangan Negara; Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Per-  
bendaharaan Negara; dan Undang-Undang  
Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan  
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan  
Negara. Menindaklanjuti undang-undang ke-  
uangan negara tersebut pada tahun 2005 Pe-  
merintah mengeluarkan Peraturan Pemerin-  
tah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar  
Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi  
Pemerintahan (SAP) tersebut masih menggu-  
nakan basis kas untuk pengakuan transaksi  
pendapatan, belanja dan pembiayaan. Se-  
dangkan untuk pengakuan aset, kewajiban,  
dan ekuitas dana menggunakan basis akrual.  
Karena belum semua transaksi menggunakan  
basis akrual, sehingga SAP ini hanya bersifat  
sementara dan perlu diganti untuk memenu-  
hi amanat Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 17 seperti yang sudah disebutkan di  
atas.

Pada tahapan selanjutnya sebagai  
rangkaian dari tindak lanjut Undang-Undang  
Nomor 17 Tahun 2003 Pemerintah menge-  
luarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Ta-  
hun 2010 Tentang Standar Akuntansi Peme-  
rintahan, sebagai pengganti sekaligus pe-  
nyempurna Peraturan Pemerintah Nomor 24  
Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pe-  
merintahan. PP No. 71 Tahun 2010 meliputi  
SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas  
Menuju Akrual. SAP Berbasis Kas Menuju  
Akrual tersebut dapat diberlakukan untuk La-  
poran Keuangan atas pertanggung jawaban

pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun  
anggaran 2014.

Kenyataannya, implementasi SAP Ber-  
basis Kas Menuju Akrual menghadapi banyak  
kendala dan hambatan. Salah satu permasa-  
lahan yang dihadapi banyak instansi peme-  
rintah daerah adalah kelangkaan sumber da-  
ya manusia aparatur yang memiliki kompe-  
tensi yang memadai untuk menyelenggarakan  
administrasi keuangan. Semenjak disusunnya  
laporan keuangan lengkap oleh Pemerintah  
Provinsi Kalsel (sesuai amanat PP No. 24 Ta-  
hun 2005) yaitu mulai tahun 2006 lalu, La-  
poran Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  
Provinsi Kalsel hanya memperoleh opini “wa-  
jar dengan pengecualian (WDP)”, pun atas  
LKPD tahun 2011 dimana Pemprov Kalsel te-  
lah bertekad dan menargetkan untuk men-  
dapatkan opini “wajar tanpa pengecualian  
(WTP)” hanya bisa puas dengan opini WDP.

Menyadari akan hambatan dalam pe-  
nerapan akuntansi berbasis akrual, Pemerin-  
tah memberikan perhatian besar demi ter-  
laksanannya implementasi SAP Berbasis  
Akrual (PP No. 71/2010). Pemerintah Daerah  
mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk  
mendanaikan kegiatan (1) Penyempurnaan be-  
berapa regulasi yang terkait, (2) Peningkatan  
dan pengembangan sumber daya manusia,  
dan (3) Peningkatan serta pengembangan  
infrastruktur lainnya.

Reformasi sektor publik menurut Ha-  
run (2009: 3) merupakan wacana yang caku-  
pannya sangat luas yang sasaran akhirnya  
adalah perubahan atau perbaikan sistem,  
institusi, program hingga kebijakan negara  
agar sumber daya ekonomi dan manusia  
yang dikuasai pemerintah dapat dimanfaat-  
kan lebih besar melalui peningkatan *efisiensi*  
maupun *efektivitas* pelayanan negara beser-  
ta institusinya kepada masyarakat. Adapun  
tujuan memperkenalkan sistem akuntansi  
akrual adalah untuk membantu meningkat-

kan transparansi dan memperbaiki *efisiensi* dan *efektivitas* sektor publik.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Basis Kas Menuju Akrual adalah merupakan produk kreativitas dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan boleh jadi istilah ini hanya ada di Indonesia. Basis kas menuju akrual ini secara umum diterapkan sejak tahun 2005 (berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005) sampai dengan tahun 2014 (berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010). Terminologi basis kas menuju akrual ini dimunculkan pertama kali dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 pada Pengantar PSAP dalam Paragraf 11.

Reformasi di bidang akuntansi pemerintahan di Indonesia ditandai dengan lahirnya 3 (tiga) paket Undang-undang di bidang keuangan negara. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut diharapkan akan mendorong pemerintah untuk mengelola keuangan negara dengan lebih baik dan membuat pertanggungjawabannya berupa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Menurut Indriasari dan Nahartoyo (2008) Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana kondisi Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Teknologi Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat menerapkan SAP Akuntansi Berbasis Akrual dan berhasil memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada Laporan Keuangan Tahun 2015. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran dan masukan bagi Pemerintah Daerah lainnya yang belum atau masih menghadapi kendala dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Selaras dengan uraian pada bagian pendahuluan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kondisi Kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terkait penerapan SAP Berbasis Akrual? (2) Bagaimana kondisi Teknologi Sistem Informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terkait penerapan SAP Berbasis Akrual?

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis Metode penelitian bersifat deskriptif, adapun urutan metode penelitian adalah sebagai berikut: (1) Mengumpulkan Informasi aktual secara rinci, yang melukiskan gejala yang ada; (2) Mengidentifikasi

masalah serta memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku; (3) Membuat perbandingan atau evaluasi, dan; (4) Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

#### **Tempat, Objek Penelitian dan Unit Analisis**

Tempat Penelitian ini adalah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang beralamat di Jalan Aneka Tambang Banjarbaru. Objek penelitian difokuskan pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Unit analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pegawai pelaksana tugas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

#### **Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini adalah mengenai Kondisi Kualitas SDM dan Sistem Teknologi Informasi di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan SAP dan Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.

Variabel Keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam menerapkan SAP berbasis akruaI dilihat melalui 2 (dua) aspek yaitu: (1) LKPD Provinsi Kalsel berbasis akruaI sesuai SAP berdasarkan PP No. 71/2010; (2) Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap LKPD Provinsi Kalimantan Selatan hasil audit BPK RI.

Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia diukur melalui 3 (tiga) aspek, yaitu: (1) Tingkat dan Latar Belakang Pendidikan; (2)

Pengalaman dan Pelatihan; dan (3) Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Akuntansi AkruaI.

#### **Pengumpulan Data**

##### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berasal dari serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang berupa fakta-fakta verbal atau keterangan-keterangan.

##### **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari hasil penelitian langsung ke Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui kuisisioner yang dibagikan kepada seluruh pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

##### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu: (1) Observasi, yaitu mengamati secara langsung fenomena yang berhubungan dengan variabel penelitian guna melengkapi data primer dan sekunder. (2) Wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada Pegawai Biro Keuangan yang dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur. (3) Kuisisioner, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan alternatif daftar pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk mengukur bagaimana Kualitas Sumber Daya Manusia pejabat pengelolaan keuangan daerah dan Sistem Teknologi Informasi di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka menerapkan PP 71/2010.

### Metode Analisa Data

Data yang terkumpul dari berbagai teknik diinterpretasikan kemudian dianalisa secara deskriptif untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan penelitian. Adapun analisis informasi jawaban kuesioner adalah sebagai berikut: (a) Mendiskripsikan demografi responden dengan memformulasikan data ke dalam bentuk tabel yang lebih ringkas dan informatif, sehingga ciri atau sifat dari data dapat diketahui. (b) Hasil jawaban pertanyaan tertutup ditabulasi berdasarkan klasifikasi pertanyaan. Kemudian dihitung persentase dari setiap item pertanyaan dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut: Jumlah responden yang menjawab “setuju” dibagi Jumlah seluruh responden dikalikan 100% dan Jumlah seluruh responden yang menjawab “tidak setuju” dibagi Jumlah seluruh responden dikalikan 100%, (c) Mendiskripsikan persentase responden yang menjawab “setuju” dan yang menjawab “tidak setuju” dari setiap item pertanyaan dalam kuisisioner kemudian menginterpretasikannya; (d) Menganalisis nilai persentase dengan hasil jawaban pertanyaan terbuka, membandingkannya dengan teori yang terkait, kemudian menginterpretasikannya; (e) Membuat kesimpulan mengenai bagaimana kondisi Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Teknologi Informasi di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menerapkan SAP dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif Jawaban Responden

#### Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia

Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia diukur dari tiga aspek yaitu: (1) Tingkat dan Latar Belakang Pendidikan, (2) Pengalaman dan Pelatihan, dan (3) Pengetahuan dan

Pemahaman SAP Berbasis Akruar. Berikut hasil jawaban kuisisioner responden mengenai variabel kualitas sumber daya manusia:

#### 1. Tingkat dan Latar Belakang Pendidikan

##### a. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan responden dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 5 (lima) yaitu: SMU, Diploma, Strata 1, Strata 2 dan Strata 3. Berikut tabulasi hasil jawaban responden mengenai tingkat pendidikan.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	%
1	SMU	7	15%
2	DIPLOMA	2	4%
3	S1	24	50%
4	S2	15	31%
5	S3	0	0%
Jumlah		48	100%

Sumber: Data Hasil Olahan, 2016.

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa pegawai Biro Keuangan yang berpendidikan SMU berjumlah 7 orang (15%), berpendidikan Diploma berjumlah 2 orang (4%), Strata 1 (S1) berjumlah 24 orang (50%), sedang yang berpendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 15 (31%) dan tidak ada yang berpendidikan Strata 3 (S3) atau 0%. Dari persentasi jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya terlihat bahwa Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S1) dengan persentasi sebanyak 50%. Kemudian disusul oleh pegawai dengan starata 2 (S2) sebanyak 31%.

Berdasarkan data dan kajian diatas dapat disimpulkan bahwa Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan didukung oleh pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memungkinkan Biro Keuangan melaksanakan kebijakan baru Penera-

pan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

b. Latar Belakang Pendidikan

Hasil tabulasi jawaban responden mengenai Latar Belakang Pendidikan diketahui bahwa responden yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi berjumlah 27 orang sedangkan yang bukan berlatar belakang pendidikan non-akuntansi berjumlah 21 orang. Tabel 2 menunjukkan bahwa pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel diisi oleh pegawai yang sebagian besar berlatar belakang pendidikan akuntansi dengan persentasi 56%.

Tabel 2. Latar Belakang Pendidikan

No.	Latar Belakang Pendidikan	Frekuensi	%
1.	Akuntansi (Keuangan)	27	56%
2.	Non-Akuntansi	21	44%
	Jumlah	48	100%

Sumber: Data Hasil Olahan, 2016.

Berdasarkan data dan analisa kuisisioner dapat disimpulkan bahwa Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan didukung oleh pegawai yang berlatar belakang pendidikan Akuntansi. Kondisi tersebut memungkinkan Biro Keuangan Sekretariat Daerah melaksanakan kebijakan baru Penerapan SAP Berbasis Akrua.

2. Pengalaman dan Pelatihan

a. Pengalaman

Masa kerja pegawai dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok. Berikut tabulasi hasil jawaban responden mengenai pertanyaan tentang pengalaman kerja:

Tabel 3. Pengalaman Kerja

No.	Lama Menduduki Posisi	Frekuensi	%
1.	0 - 1 Tahun	4	8%
2.	1 - 2 Tahun	5	10%

3	2 - 4 Tahun	12	25%
4	> 4 Tahun	27	56%
	Jumlah	48	100%

Sumber: Data Hasil Olahan, 2016.

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa lebih dari separuh pegawai Biro Keuangan telah memiliki pengalaman kerja lebih dari 4 tahun yakni sebanyak 27 orang (56%). Sebanyak 12 orang (25%) pegawai memiliki pengalaman selama 2-4 tahun, 5 orang (10%) selama 1-2 tahun, dan hanya 4 orang (8%) yang baru memiliki pengalaman selama 0 – 1 tahun. Masa kerja yang lebih lama dapat menunjukkan bahwa pegawai tersebut telah menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam pekerjaan yang membuat dia lebih ahli dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Dengan dominannya jumlah pegawai Biro Keuangan yang memiliki pengalaman lebih lama yakni lebih dari 4 tahun, maka kondisi tersebut dapat mendukung Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kebijakan baru Penerapan SAP Berbasis Akrua.

b. Pelatihan

Berikut hasil tabulasi jawaban responden mengenai pertanyaan tentang Pelatihan SAP Berbasis Akrua:

Tabel 4. Pelatihan

No.	Pelatihan	Frekuensi	%
1.	Pernah Mengikuti Pelatihan	28	58%
2.	Tidak Pernah Ikut Pelatihan	20	42%
	Jumlah	48	100%

Sumber: Data Hasil Olahan, 2016.

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah atau sudah mendapatkan pelatihan mengenai SAP Berbasis Akrua yakni sebesar

58% responden. Sedangkan yang belum pernah mengikuti pelatihan adalah sebesar 42% responden. Berdasarkan hasil analisa jawaban kuisisioner, responden yang menjawab tidak pernah mengikuti pelatihan mengenai SAP Berbasis Akrua didominasi oleh pegawai pada bagian anggaran dan perbendaharaan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara bahwa bagian Anggaran dan Perbendaharaan dalam pekerjaannya tidak berhubungan langsung dengan SAP Berbasis Akrua. Sedangkan yang banyak berhubungan langsung dengan SAP Berbasis Akrua adalah bagian Akuntansi dan Evaluasi dimana sebagian besar dari mereka telah atau pernah mengikuti pelatihan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel memiliki kondisi SDM yang dapat mendukung kebijakan baru Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

### 3. Pemahaman terhadap SAP dan Akuntansi Akrua

#### a. SAP Berbasis Akrua

Untuk dapat melaksanakan SAP berbasis akrua, aparaturnya harus mengerti dan memahami konsep basis akuntansi serta pernyataan-pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang tertuang dalam SAP pada PP No. 71 tahun 2010.

Berdasarkan data tabel 5 pernyataan 1 diketahui, bahwa sebanyak 81% atau sejumlah 39 responden menjawab “setuju” dengan pernyataan dan sebanyak 2% atau sejumlah 1 responden yang menyatakan “tidak setuju”. Sedangkan sisanya sebanyak 17% atau sejumlah 8 responden tidak memberikan jawaban. Tabel 5 menunjukkan bahwa pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel sebagian besar memahami mengenai basis yang digunakan untuk pengakuan beban dan pendapatan-Lo dalam SAP Berbasis Akrua.

Tabel 5: Tanggapan Responden atas Pemahaman SAP Berbasis Akrua

Pernyataan	Setuju		Tidak Setuju		Kosong		Jml
	F	%	F	%	f	%	
1. SAP berbasis Akrua menggunakan Basis Akrua untuk pengakuan Beban dan Pendapatan-LO	39	81%	1	2%	8	17%	48
2. SAP Berbasis Akrua menggunakan Basis Akrua untuk Pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.	39	81%	1	2%	8	17%	48
3. Pendapatan-LRA menurut SAP Berbasis Akrua diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Entitas Pelaporan, sedangkan Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi	35	73%	2	4%	11	23%	48
4. Dalam SAP berbasis Akrua, Konstruksi dalam Pengerjaan dimasukkan sebagai Perseediaan	18	38%	20	42%	10	21%	48
5. Pada SAP Berbasis Akrua, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tetap disajikan menggunakan Akuntansi Berbasis Kas	31	65%	6	13%	11	23%	48

---

6. Pada SAP Berbasis AkruaI, Laporan Operasional (LO) diperlukan untuk menyajikan informasi mengenai kinerja pemerintah daerah dalam mengumpulkan dan menggunakan sumber daya ekonomi	33	69%	4	8%	11	23%	48
---	----	-----	---	----	----	-----	----

---

Sumber: Data Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data tabel 5 pernyataan 2 diketahui, bahwa sebanyak 81% atau sejumlah 39 responden menjawab “setuju” dengan pernyataan dan sebanyak 2% atau sejumlah 1 responden yang menyatakan “tidak setuju”. Sedangkan sisanya sebanyak 17% atau sejumlah 8 responden tidak memberikan jawaban. Tabel 5 pernyataan 2 menunjukkan bahwa pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel sebagian besar memahami mengenai basis yang digunakan untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam SAP Berbasis AkruaI.

Berdasarkan data tabel 5 pernyataan 3 diketahui, bahwa sebanyak 73% atau sejumlah 35 responden menjawab “setuju” dengan pernyataan dan sebanyak 4% atau sejumlah 2 responden yang menyatakan “tidak setuju”. Sedangkan sisanya sebanyak 23% atau sejumlah 11 responden tidak memberikan jawaban. Tabel 5 pernyataan 3 menunjukkan bahwa pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel sebagian besar memahami mengenai pengakuan atas Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO dalam SAP Berbasis AkruaI.

Berdasarkan data tabel 5 pernyataan 4 diketahui, bahwa sebanyak 38 % atau sejumlah 18 responden menjawab “setuju” dengan pernyataan dan sebanyak 42% atau sejumlah 20 responden yang menyatakan “tidak setuju”. Sedangkan sisanya sebanyak 21% atau sejumlah 10 responden tidak memberikan jawaban. Tabel 5 pernyataan 4 menunjukkan bahwa pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel sebagian besar belum memahami mengenai pengklasifikasian Kon-

struksi dalam Pengerjaan dalam SAP Berbasis AkruaI.

Berdasarkan data tabel 5 pernyataan 5 diketahui, bahwa sebanyak 65% atau sejumlah 31 responden menjawab “setuju” dengan pernyataan dan sebanyak 13% atau sejumlah 6 responden yang menyatakan “tidak setuju”. Sedangkan sisanya sebanyak 23% atau sejumlah 11 responden tidak memberikan jawaban. Tabel 5 pernyataan 5 menunjukkan bahwa pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel sebagian besar memahami mengenai penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam SAP Berbasis AkruaI.

Berdasarkan data tabel 5 pernyataan 6 diketahui, bahwa sebanyak 69% atau sejumlah 33 responden menjawab “setuju” dengan pernyataan dan sebanyak 8% atau sejumlah 4 responden yang menyatakan “tidak setuju”. Sedangkan sisanya sebanyak 23% atau sejumlah 11 responden tidak memberikan jawaban. Tabel 5 pernyataan 6 menunjukkan bahwa pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel sebagian besar memahami mengenai kegunaan penyajian Laporan Operasional (LO) dalam SAP Berbasis AkruaI.

b. Pemahaman terhadap Basis Akuntansi AkruaI

Berdasarkan data tabel 6 pernyataan 1 diketahui, bahwa sebanyak 83% atau sejumlah 40 responden menjawab “setuju” dengan pernyataan dan sebanyak 15% atau sejumlah 7 responden yang menyatakan “tidak setuju”. Sedangkan sisanya sebanyak 2% atau sejumlah 1 responden tidak memberikan jawaban. Tabel 6 pernyataan 1 menunjukkan bah-

wa pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel sebagian besar memahami mengenai konsep basis akrual dalam hal informasi yang dihasilkan akuntansi berbasis akrual.

Berdasarkan data tabel 6 pernyataan 2 diketahui, bahwa sebanyak 81% atau sejumlah 39 responden menjawab “setuju” dengan pernyataan dan sebanyak 2% atau sejumlah 1 responden yang menyatakan “tidak setuju”. Sedangkan sisanya sebanyak 17% atau sejumlah 8 responden tidak memberikan jawaban. Tabel 6 pernyataan 2 menunjukkan bahwa pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel sebagian besar memahami mengenai kapan saat pengakuan, pencatatan, dan penyajian laporan keuangan dalam akuntansi berbasis akrual.

Berdasarkan data tabel 6 pernyataan 3 diketahui, bahwa sebanyak 81% atau sejumlah 39 responden menjawab “setuju” dengan

pernyataan dan sebanyak 4% atau sejumlah 2 responden yang menyatakan “tidak setuju”. Sedangkan sisanya sebanyak 15% atau sejumlah 7 responden tidak memberikan jawaban. Tabel 6 pernyataan 3 menunjukkan bahwa pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel sebagian besar memahami mengenai kapan pendapatan diakui dalam akuntansi berbasis akrual.

Berdasarkan data tabel 6 pernyataan 4 diketahui, bahwa sebanyak 73% atau sejumlah 39 responden menjawab “setuju” dengan pernyataan dan sebanyak 6% atau sejumlah 3 responden yang menyatakan “tidak setuju”. Sedangkan sisanya sebanyak 21% atau sejumlah 10 responden tidak memberikan jawaban. Tabel 6 pernyataan 4 menunjukkan bahwa pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel sebagian besar memahami mengenai kapan beban diakui dalam akuntansi berbasis akrual.

Tabel 6: Tanggapan Responden atas Pemahaman terhadap Basis Akuntansi Akrual

Pernyataan	Setuju		Tidak Setuju		Kosong		Jlh
	F	%	F	%	f	%	
1. Secara Konseptual Akuntansi Berbasis Akrual akan menghasilkan informasi yang lebih lengkap, akuntabel dan transparan dibandingkan dengan Akuntansi Berbasis Kas	40	83%	7	15%	1	2%	48
2. Akuntansi Berbasis Akrual adalah Basis Akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas dibayarkan	39	81%	1	2%	8	17%	48
3. Pendapatan menurut Basis Akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut	39	81%	2	4%	7	15%	48
4. Beban menurut Basis Akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.	35	73%	3	6%	10	21%	48
5. Dalam Akuntansi Berbasis Akrual, terhadap	38	79%	2	4%	8	17%	48

Aset Tetap dilakukan penyesuaian nilai (penyusutan) seiring dengan penurunan kapasitas dan kemampuan Aset Tetap							
6. Pemeliharaan Aset Tetap yang bersifat rutin dan berkala dikapitalisasi	34	71%	3	6%	11	23%	48

Sumber: Data Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data tabel 6 pernyataan 5 diketahui, bahwa sebanyak 79 % atau sejumlah 38 responden menjawab “setuju” dengan pernyataan dan sebanyak 4% atau sejumlah 2 responden yang menyatakan “tidak setuju”. Sedangkan sisanya sebanyak 17% atau sejumlah 8 responden tidak memberikan jawaban. Tabel 6 pernyataan 5 menunjukkan bahwa pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel sebagian besar memahami mengenai penyusutan atas aset tetap dalam akuntansi berbasis akrual.

Berdasarkan data tabel 6 pernyataan 6 diketahui, bahwa sebanyak 71 % atau sejumlah 34 responden menjawab “setuju” dengan pernyataan dan sebanyak 6% atau sejumlah 3 responden yang menyatakan “tidak setuju”. Sedangkan sisanya sebanyak 23% atau sejumlah 11 responden tidak memberikan jawaban. Tabel 6 pernyataan 6 menunjukkan bahwa pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar belum memahami mengenai konsep kapitalisasi atau pengeluaran setelah perolehan atas aset tetap dalam akuntansi berbasis akrual.

### Variabel Sistem Teknologi Informasi

Peran sistem teknologi informasi dalam kegiatan akuntansi adalah dalam rangka meningkatkan *efisiensi* dan *efektifitas* kegiatan akuntansi serta meningkatkan kualitas hasil dari laporan akuntansi. Variabel Sistem Teknologi Informasi diukur dari tiga aspek yaitu: (1) *Hardware*; (2) *Software*; dan (3) Layanan

komunikasi data. Berikut hasil jawaban kuisioner responden mengenai variabel kualitas sumber daya manusia:

Berdasarkan data tabel 7 diketahui, bahwa sebanyak 92% atau sejumlah 44 responden menjawab “setuju” dengan pernyataan dan sebanyak 4% atau sejumlah 2 responden yang menyatakan “tidak setuju”. Sedangkan sisanya sebanyak 4% atau sejumlah 2 responden tidak memberikan jawaban. Tabel 7 menunjukkan bahwa perangkat pendukung berupa *hardware* tersedia dengan memadai untuk mendukung pekerjaan pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data tabel 8 diketahui, bahwa sebanyak 92% atau sejumlah 44 responden menjawab “setuju” dengan pernyataan dan sebanyak 6% atau sejumlah 3 responden yang menyatakan “tidak setuju”. Sedangkan sisanya sebanyak 2% atau sejumlah 1 responden tidak memberikan jawaban. Tabel 8 menunjukkan bahwa tersedia software berupa program atau aplikasi untuk mendukung penerapan SAP Berbasis Akrual pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi yang digali dari responden, program/aplikasi yang tersedia dalam rangka pengelolaan dan pelaporan keuangan di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah: (1) SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah); (2) SIM-BMD (Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah); (3) Aplikasi Persediaan Barang Daerah.

Tabel 7: Pernyataan Aspek *Hardware*

Pernyataan	Setuju		Tidak Setuju		Kosong		Jlh
	F	(%)	f	(%)	f	(%)	
Perangkat pendukung pekerjaan berupa <i>hardware</i> seperti komputer dan perangkatnya tersedia dengan memadai	44	92%	2	4%	2	4%	48

Sumber: Data Hasil Olahan, 2016

Tabel 8: Pernyataan Aspek *Software*

Pernyataan	Setuju		Tidak Setuju		Kosong		Jlh
	F	(%)	f	(%)	f	(%)	
Tersedia software berupa program atau aplikasi yang mendukung penerapan SAP Berbasis Akrua	44	92%	3	6%	1	2%	48

Sumber: Data Hasil Olahan, 2016

Tabel 9: Pernyataan Layanan Komunikasi Data

Pernyataan	Setuju		Tidak Setuju		Kosong		Jlh
	F	(%)	f	(%)	f	(%)	
Tersedia layanan Komunikasi data dan Jaringan Komputer seperti LAN dan Internet yang memadai	44	92%	2	4%	2	4%	48

Sumber: Data Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan data tabel 9 diketahui, bahwa sebanyak 92% atau sejumlah 44 responden menjawab “setuju” dengan pernyataan dan sebanyak 4% atau sejumlah 2 responden yang menyatakan “tidak setuju”. Sedangkan sisanya sebanyak 4% atau sejumlah 2 responden tidak memberikan jawaban. Tabel 9 menunjukkan bahwa tersedia Layanan Komunikasi Data yang memadai dalam rangka mendukung pekerjaan pengelolaan dan pelaporan keuangan pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel. Berdasarkan informasi yang digali dari responden, Layanan komunikasi data yang tersedia di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel adalah: LAN dan Internet.

#### **Penerapan SAP Berbasis Akrua di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan**

Dalam rangka penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Selatan mengeluarkan instruksi tentang “Rencana Aksi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan”. Instruksi tersebut berisi:

1. Kepada Sekretaris Daerah agar mengkoordinasikan kepada SKPD/UKPD dalam rangka pelaksanaan rencana aksi penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel;
2. Kepada Inspektur Provinsi melakukan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrua;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan agar menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi untuk ditempatkan di SKPD/UKPD;

4. Kepala Dinas Pendapatan, Kepala Biro Keuangan serta Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Kalimantan Selatan agar:
  - (a) menyusun peraturan yang diperlukan untuk penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua yang terintegrasi
  - (b) mengembangkan sistem aplikasi penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua

Dengan segala upaya yang telah dilakukan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil membuat dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2015 Berbasis Akrua sesuai dengan SAP (PP No. 71/2010). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK RI, menyatakan BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalsel tanggal 31 Desember 2015, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### Implikasi

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai media ilmiah untuk mendorong dan memacu dilakukannya penelitian berikutnya di bidang akuntansi pemerintahan, khususnya terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Hal ini penting, karena mempertimbangkan bahwa sebagai instrument yang penting artinya dikaitkan dengan pengelolaan dan tanggungjawab publik di bidang keuangan dan

merupakan inti dari reformasi dibidang akuntansi pemerintahan.

Implikasi yang juga diinginkan adalah suatu alasan *Good Coperate Governance*. Dalam bentuk ini, aspek yang dibahas tidak hanya menyangkut akuntansi dan pelaporan, tetapi juga dalam lingkup perspektif manajemen keuangan daerah, yang meliputi: (a) Perencanaan dan penempatan SDM yang kompeten dalam bidang akuntansi (b) Penggunaan Sitem Teknologi Informasi keuangan yang terpadu (c) Melakukan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan penerapaaan SAP secara berkesinambungan.

## PENUTUP

### Simpulan

Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan siap dalam menerapkan SAP Berbasis Akrua. Kondisi Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Teknologi Informasi pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel mendukung terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrua. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel memiliki SDM yang berkualitas dalam rangka penerapan SAP Berbasis Akrua. Selanjutnya dalam hal kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai SAP Berbasis Akrua, Biro keuangan didukung dengan Sistem Teknologi dan Informasi yang memadai sehingga meningkatkan *efisiensi* dan *efektifitas* kegiatan akuntansi serta meningkatkan kualitas hasil dari laporan akuntansi. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel telah berhasil mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam hal SDM dan Infrastruktur.

Pegawai Biro Keuangan sebagian besar memiliki tingkat pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) dengan persentasi 50% disusul Strata 2 (S2) dengan persentasi 31%.

Pegawai Biro Keuangan sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi dengan persentasi 56%.

Pegawai Biro Keuangan sebagian besar (56%) memiliki pengalaman kerja dengan masa kerja lebih dari 4 tahun, disusul dengan masa kerja 2 – 4 (dua sampai dengan empat) tahun.

Pegawai Biro Keuangan sebagian besar telah atau sudah mendapatkan pelatihan mengenai SAP Berbasis Akruai, dengan persentasi sebanyak 58% pegawai.

Pegawai Biro Keuangan memiliki pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.71/2010). Dalam hal yang umum, seperti pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas, Pegawai Biro Keuangan sudah memahaminya. Sedangkan dalam hal yang lebih spesifik seperti Konstruksi Dalam Pengerjaan hanya sebagian kecil yang sudah memahaminya.

Pegawai Biro Keuangan memiliki pemahaman terhadap konsep Akuntansi Akruai. Sebagaimana pemahaman terhadap SAP Akruai, dalam hal yang umum pegawai biro keuangan memahami konsep Akuntansi Akruai. Sedangkan dalam hal spesifik seperti Kapitalisasi Aset Tetap hanya sebagian kecil pegawai Biro Keuangan yang memahaminya.

Dukungan Sistem Teknologi Informasi dalam rangka penerapan SAP Berbasis Akruai di Biro Keuangan merupakan satu kesatuan dari ketersediaan *hardware*, *software* dan layanan data di Biro Keuangan. Dimana, tersedia *hardware* yang cukup memadai yang sangat membantu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya, tersedia *software* akuntansi (SIPKD, SIM-BD, dan Aplikasi Persediaan) yang membantu dalam mengolah data dan membuat laporan keuangan secara *efektif* dan *efisien*, serta tersedia layanan komunikasi data yang mempercepat dan mempermudah komunikasi, penyampaian informasi,

serta penghimpunan data keuangan serta memungkinkan penggunaan *software/aplikasi* secara bersamaan di lingkungan Biro Keuangan.

### Saran

Meskipun hasil penelitian menunjukkan SDM di Biro Keuangan sudah bagus, perlu terus diupayakan peningkatan kualitas yang berkesinambungan. Dalam hal tingkat pendidikan, Pemerintah Daerah dapat memberikan tugas studi lanjut kepada pegawai yang belum Sarjana dengan pilihan bidang studi akuntansi. Sedangkan untuk pelatihan sebaiknya materi lebih mendalam sampai pada pembahasan kasus per kasus kegiatan akuntansi yang memang sering terjadi di Pemerintah Daerah.

Dalam hal ketersediaan dan penggunaan sistem teknologi informasi yang sudah baik, perlu pemeliharaan atau *maintenance* perangkat sistem teknologi informasi tersebut agar dapat dipergunakan secara berkesinambungan. Sehingga memerlukan staff atau tenaga ahli khusus yang menguasai bidang IT sekaligus memahami akuntansi untuk melakukan *maintenance* dan juga mengatasi jika terjadi *trouble*.

Penelitian selanjutnya sebaiknya melibatkan seluruh SKPD Pemerintah Daerah, mengingat penelitian ini hanya terbatas pada satu SKPD yaitu Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga memperoleh gambaran kondisi SDM pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemda secara menyeluruh.

Alangkah baiknya jika pengisian kuesioner dilakukan melalui wawancara langsung oleh peneliti kepada responden. Karena jika hanya menggunakan kuesioner yang diisi sendiri oleh responden terkadang dapat menghasilkan simpulan yang bias.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2005. *Manajemen Penelitian*, Edisi Revisi, Rineka Cipta. Jakarta.
- Harun, 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Sa-lemba Empat. Jakarta.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartoyo, 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)*, dalam SNA XI. 23-24 Juli. Pontianak.
- Republik Indonesia, 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- \_\_\_\_\_, 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012*.
- Sulani A., Aldiani, 2009. *Faktor-Faktor Pendukung Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu*. **Skripsi**. USU. Medan.